

Katalog: 9302020.7415

ISSN 2622-4569



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BUTON SELATAN

MENURUT PENGELOUARAN 2020-2024

VOLUME 9, 2025

<https://busekab.bps.go.id>



Katalog: 9302020.7415

ISSN 2622-4569



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BUTON SELATAN

MENURUT PENGELOUARAN 2020-2024

VOLUME 9, 2025

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BUTON SELATAN
MENURUT PENGELUARAN 2020-2024**

ISSN : 2622-4569
Nomor Publikasi : 74150.25005
Katalog BPS : 9302020.7415

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv +72 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan
Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan
Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan
Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2020–2024 ini merupakan kelanjutan dari publikasi pada tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Buton Selatan. Publikasi ini memberikan gambaran deskriptif mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Buton Selatan. Di dalamnya disajikan pula tabel-tabel PDRB tahun 2020–2024 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2010, baik dalam bentuk nilai nominal maupun persentase. Beberapa data yang tercantum masih bersifat sementara karena belum tersedianya data final secara lengkap, dan akan diperbarui pada publikasi berikutnya. Pengguna data diharapkan memperhatikan status data dan dianjurkan menggunakan data terbaru dari publikasi yang paling mutakhir.

Selain memuat data PDRB, publikasi ini juga menyajikan konsep, definisi, metodologi, serta ruang lingkup penyusunan PDRB berdasarkan pengeluaran. Hal ini bertujuan agar pengguna data dapat memahami PDRB Pengeluaran secara menyeluruh.

Terbitnya publikasi ini tidak terlepas dari kerja sama dan kontribusi berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna untuk berbagai keperluan.

Batauga, April 2025
Plt. KEPALA BPS
KABUPATEN BUTON SELATAN

Agung Septianto Wibowo, S.ST.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BUTON SELATAN MENURUT
PENGELUARAN 2020-2024
VOLUME 9, 2025**

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB	6
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	19
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	22
2.6 EKSPOR - IMPOR	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BUTON SELATAN MENURUT PDRB PENGELUARAN 2020-2024.....	27
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	29
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	38
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN BUTON SELATAN 2020- 2024	49
4.1 PDRB (NOMINAL).....	52
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	53
4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)	54
BAB V PENUTUP	55
VI LAMPIRAN.....	59
VII DAFTAR PUSTAKA	69

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	30
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024.....	32
Tabel 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024.....	34
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	36
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024.....	37
Tabel 6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	40
Tabel 7	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	41
Tabel 8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	43
Tabel 9	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	45
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	46
Tabel 11	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024.....	47
Tabel 12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita, Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	53
Tabel 13	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	54
Tabel 14	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	55

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024 (Miliar Rp).....	31
Grafik 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	33
Grafik 3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	33
Grafik 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024	35

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	59
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	60
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Persen).....	61
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Persen).....	62
Lampiran 5.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024.....	63
Lampiran 6.	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (Persen)	64

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://buselkab.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.



PDRB ADHB



PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

PDRB ADHK

PDRB Atas Dasar Harga Konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (tidak dipengaruhi inflasi)



Halaman ini sengaja dikosongkan

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii)

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui

penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
$GFCF$ (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta \text{ Inventori}$	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta $\Delta \text{Inventori}$ merupakan bentuk

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut

diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai asset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010



2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



KOMPONEN PDRB PENGELOUARAN

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)



1



Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit (PK-LNPRT)

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)



2



Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Perubahan Inventori



3

4



5

Ekspor Impor

6

Halaman ini sengaja dikosongkan

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;

5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga

swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);

5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak

terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} &= \text{Output} - \\ &\quad \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ &\quad \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ &\quad \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti

bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM +
Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea
Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi: PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang

mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses penggerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- 1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- 2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- 3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- 4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- 5. Data komoditas perkebunan;
- 6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- 7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- 8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata
(t)

2.6 EKSPOR-IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari eksport ke luar provinsi/kabupaten/kota dan impor dari luar provinsi/kabupaten/kota. Selisih antara eksport dan impor didefinisikan sebagai Net Eksport.

iv Sumber Data

Nilai eksport-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Eksport. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Eksport kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Eksport menjadi eksport dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN



PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILIAH RUPIAH), TAHUN 2024

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

49,92



1

2

3

4

5

6

2.251,23

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit (PK-LNPRT)

474,93



Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

1.414,34



Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

22,02



Perubahan Inventori

385,83



Net Ekspor

Halaman ini sengaja dikosongkan

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELOUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 ($2010=100$) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 ($2000=100$). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2024 naik sebesar 6,50 persen, yakni dari 3.593,17 miliar Rupiah menjadi 3.826,60 miliar Rupiah. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, maka kenaikan ini lebih kecil, yakni dari 2.161,37 miliar Rupiah ($2010=100$) menjadi 2.213,51 miliar Rupiah ($2010=100$), atau naik sebesar 2,41 persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali normal karena pandemi Covid-19 mulai berkurang persebarannya, perekonomian Kabupaten Buton Selatan mulai tahun 2022 ikut mengalami dampak yang sama yakni tumbuh positif. Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 2,41 persen.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Buton Selatan pada tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi 4,87 persen. Di era pandemi Covid-19 tahun 2021, mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,39 persen dan berangsur pulih mulai tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 2,29 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

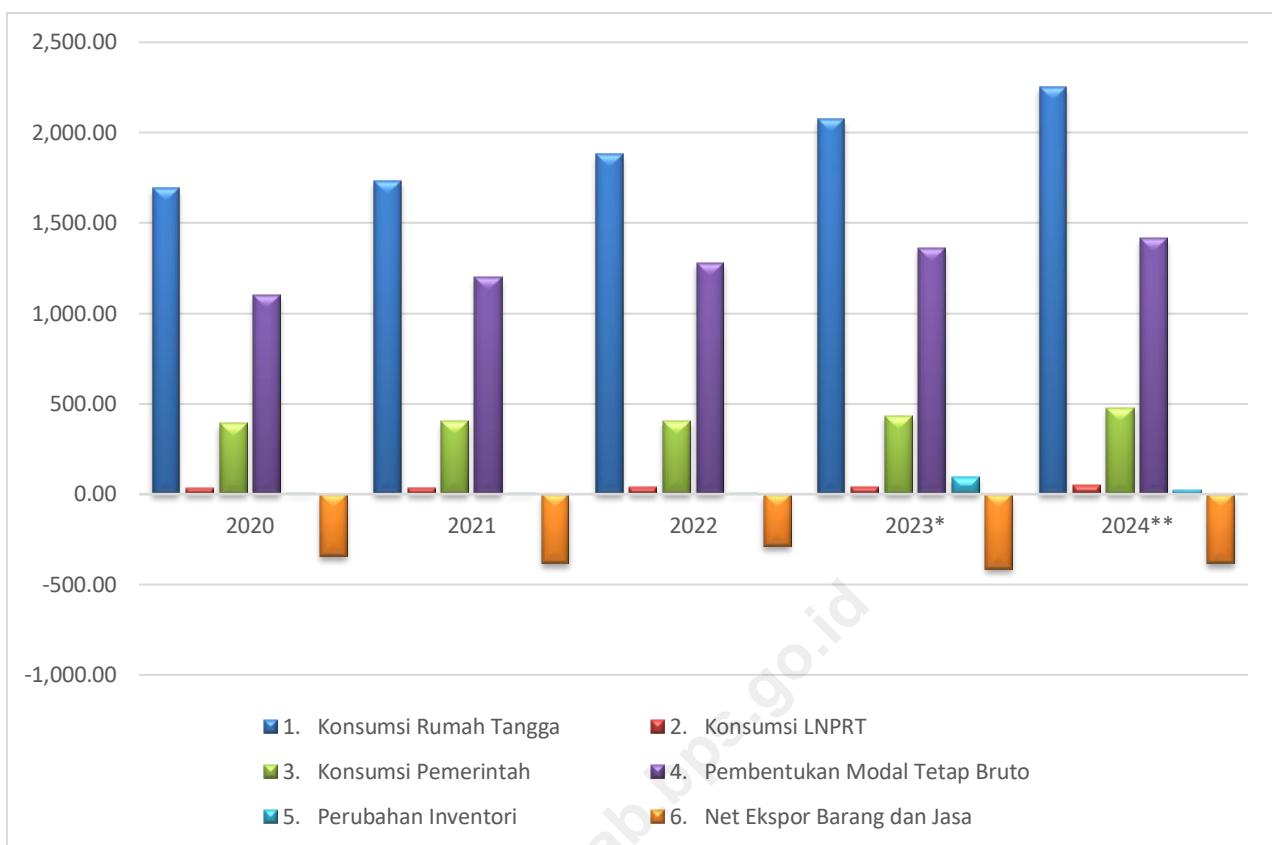
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure Item</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	1.691,75	1.731,65	1.882,25	2.072,51	2.251,23
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	32,96	34,39	37,51	41,49	49,92
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	389,84	405,69	405,47	434,59	474,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	1.104,33	1.201,79	1.278,39	1.362,00	1.414,34
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	1,27	1,33	1,35	96,57	22,02
6. Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports</i>	(345,42)	(380,87)	(290,86)	(414,01)	(385,83)
PDRB / GRDP	2.874,73	2.993,97	3.314,10	3.593,17	3.826,60

Pada periode tahun 2020–2024, PDRB Kabupaten Buton Selatan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2.874,73 miliar Rupiah pada tahun 2020; meningkat menjadi 2.993,97 miliar Rupiah pada tahun 2021; 3.314,10 miliar Rupiah pada tahun 2022; 3.593,17 miliar Rupiah pada tahun 2023; dan mencapai 3.826,60 miliar Rupiah pada tahun 2024. Kenaikan pada periode 2020–2024 ini dipengaruhi oleh perubahan harga maupun volume. Pertumbuhan PDRB dari sisi produksi turut diikuti oleh peningkatan dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Buton Selatan pada periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 1 dan grafik 1.

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024 (Miliar Rp)



Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat diukur atas dasar harga konstan 2010, yaitu menggunakan harga berbagai jenis produk sebagaimana divaluasi pada tahun 2010. Pendekatan ini memberikan gambaran perubahan PDRB dari sisi volume atau kuantitas tanpa pengaruh perubahan harga. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 mencerminkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Buton Selatan pada periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 2 dan grafik 2 berikut.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

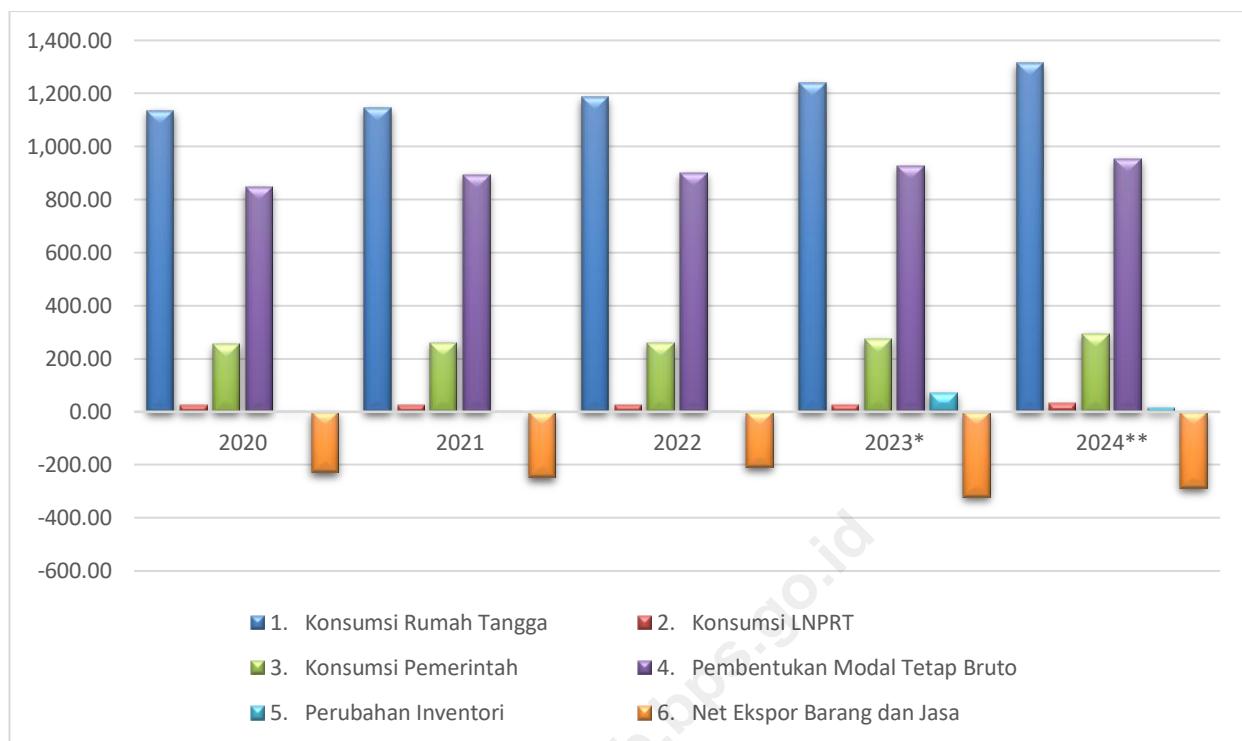
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.135,49	1.146,96	1.186,34	1.237,52	1.312,51
2. Konsumsi LNPRT	24,60	25,09	26,15	27,48	32,16
3. Konsumsi Pemerintah	255,24	261,60	259,24	272,60	294,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	846,20	893,87	897,80	926,49	953,73
5. Perubahan Inventori	0,96	0,98	1,00	70,10	15,48
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(228,90)	(248,31)	(209,15)	(320,68)	(287,95)
PDRB	2.033,59	2.080,20	2.161,37	2.213,51	2.320,67

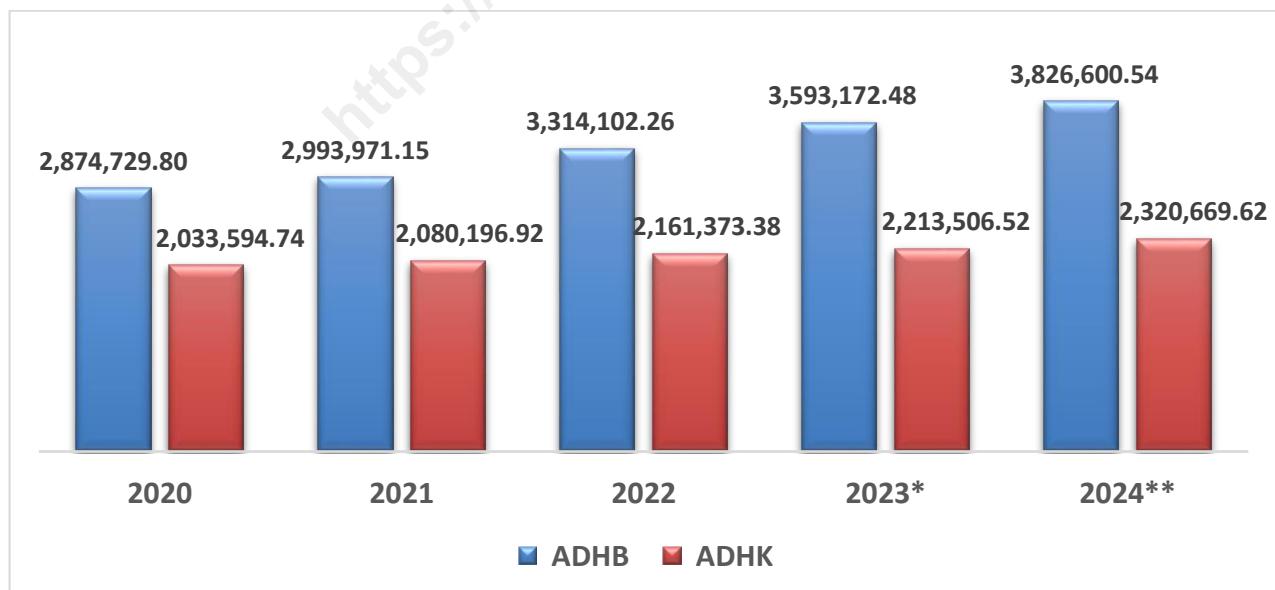
Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Buton Selatan sejalan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB cenderung mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19. Tahun 2020, nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Buton Selatan sebesar 2.033,59 miliar Rupiah; mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2.080,20 miliar Rupiah; meningkat lagi tahun 2022 menjadi 2.161,37 miliar Rupiah; tahun 2023 menjadi 2.213,51 miliar Rupiah; dan mengalami peningkatan kembali tahun 2024 menjadi 2.320,67 miliar Rupiah.

Selanjutnya, pada grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Selatan mengalami perlambatan, yakni dari 2,41 persen pada tahun 2023 menjadi 2,29 persen pada tahun 2024.

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024



Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024



Berdasarkan data pada grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2021 dikarenakan dimulainya pandemi Covid-19.

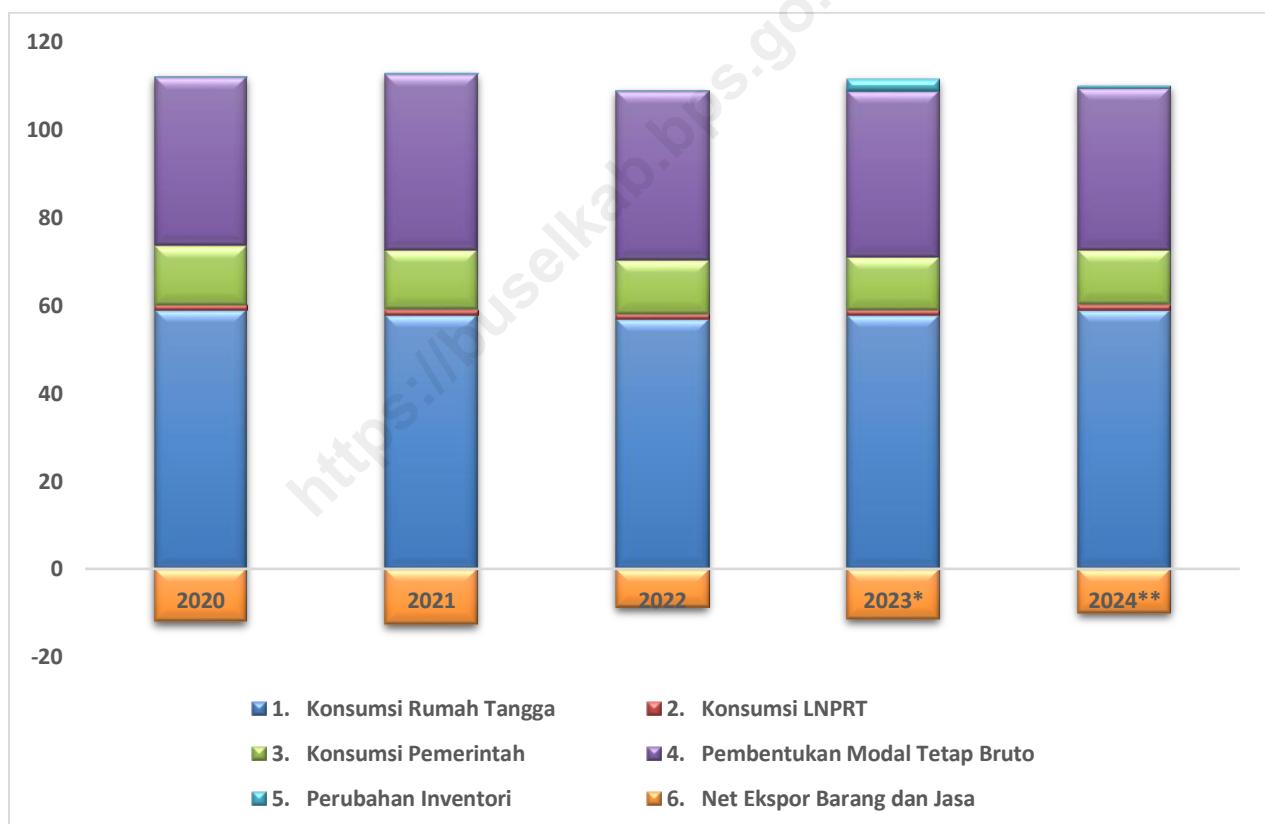
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

(%)					
Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58,85	57,84	56,81	57,68	58,83
2. Konsumsi LNPRT	1,15	1,15	1,13	1,15	1,30
3. Konsumsi Pemerintah	13,56	13,55	12,23	12,10	12,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,42	40,14	38,57	37,91	36,96
5. Perubahan Inventori	0,04	0,04	0,04	2,69	0,58
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(12,02)	(12,72)	(8,78)	(11,52)	(10,08)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluru komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2020–2024, PDRB Kabupaten Buton Selatan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), dengan kontribusi sebesar 56,81–58,85 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang cukup besar, yakni berkisar antara 36,96 hingga 40,14 persen. Sementara itu, komponen net ekspor selalu menunjukkan nilai negatif, yaitu berkisar antara -8,78 persen hingga -12,72 persen, yang menunjukkan bahwa impor barang dan jasa lebih tinggi daripada eksportnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih dipenuhi oleh produk dari luar wilayah.

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 12–14 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu

besar. Di sisi lain, pada tahun 2020–2024 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasikan oleh komponen ekspor dan impor menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2020–2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan mengalami perlambatan, yakni sebesar 4,87 persen (2020) dan -1,39 persen (2021). Kemudian periode 2022–2023 mengalami peningkatan pertumbuhan yakni sebesar 2,29 persen (2022) dan 3,90 persen (2023). Namun di tahun 2024 mengalami perlambatan kembali yaitu sebesar 2,41 persen.

Tabel 4 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan berdasarkan komponen penyusunnya selama 2020–2024.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

(%)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-0,10	1,01	3,48	4,27	6,06
2. Konsumsi LNPRT	-6,82	1,99	4,23	5,08	17,03
3. Konsumsi Pemerintah	-3,19	2,49	-0,90	5,15	8,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,04	5,63	0,37	3,26	2,94
5. Perubahan Inventori	0,80	2,13	1,21	6.932,69	-77,91
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	0	0,68	4,44	-8,2	5,54

PDRB	-1,39	2,29	3,90	2,41	4,84
-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Indikator lain yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan nilai PDRB adalah indeks implisit. Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi, maupun ekspor/import. Konsumen yang dimaksud adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), pemerintah, dan perusahaan. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2020–2024, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Kenaikan harga terbesar terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena naiknya sebagian besar indeks kelompok makanan, minuman, dan rokok serta transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	148,99	150,98	158,62	167,47	171,52	
2. Konsumsi LNPRT	133,99	137,06	143,44	151,01	155,24	
3. Konsumsi Pemerintah	152,73	155,08	156,41	159,43	161,13	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	130,50	134,45	142,47	147,01	148,30	
5. Perubahan Inventori	131,36	135,10	135,28	137,76	142,22	
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,00)	(2,45)	1,25	2,34	1,19	
PDRB	141,36	143,93	153,33	162,33	164,89	

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELOUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Buton Selatan untuk periode 2020-2024.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Buton Selatan ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Buton Selatan maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Selama periode 2020–2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami tren peningkatan, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2010. Nilai

konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp1.691,75 miliar pada 2020 dan meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp2.251,23 miliar pada 2024. Sementara itu, berdasarkan harga konstan, nilainya naik dari Rp1.135,49 miliar menjadi Rp1.312,51 miliar. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga menunjukkan peningkatan permintaan domestik yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stabil dalam kisaran 56,80 hingga 58,85 persen. Proporsi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 58,85 persen, sementara angka terendah terjadi pada 2022 dengan 56,80 persen. Stabilitas kontribusi ini menandakan peran dominan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB serta sebagai indikator ketahanan permintaan domestik terhadap berbagai tekanan ekonomi, termasuk pasca-pandemi.

Dari sisi pertumbuhan riil, konsumsi rumah tangga menunjukkan percepatan yang konsisten. Pertumbuhan tercatat sebesar 1,01 persen pada 2021, meningkat menjadi 3,43 persen pada 2022, kemudian 4,27 persen pada 2023, dan akhirnya 6,04 persen pada 2024. Kinerja positif ini mencerminkan pulihnya pendapatan dan kepercayaan konsumen, yang kemungkinan didorong oleh membaiknya kondisi pasar tenaga kerja, peningkatan mobilitas masyarakat, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
- ADHB (Miliar Rp)	1.691,75	1.731,65	1.882,25	2.072,51	2.251,23
- ADHK (Miliar Rp/ Billion Rp)	1.135,49	1.146,96	1.186,34	1.237,52	1.312,51

- Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	58,85	57,84	56,80	57,68	58,83
Pertumbuhan (ADHK 2010)		1,01	3,43	4,27	6,04

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2010. Pada tahun 2020, konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp32,96 miliar dan terus meningkat setiap tahun, mencapai Rp49,92 miliar pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas operasional dan pendanaan lembaga nonprofit dalam menjalankan program-program sosialnya. Proporsi terhadap total PDRB tetap stabil dalam kisaran 1,13 hingga 1,30 persen, dengan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2024, menandakan peran LNPRT yang relatif konstan dalam struktur ekonomi daerah.

Dari sisi harga konstan (ADHK 2010), pengeluaran konsumsi LNPRT juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten meskipun berfluktuasi. Pertumbuhan tercatat sebesar 2,08 persen pada 2021, kemudian meningkat menjadi 4,26 persen pada 2022, dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan pertumbuhan 5,08 persen. Pada 2024, pertumbuhan melambat menjadi 3,35 persen, namun tetap positif. Kenaikan ini merefleksikan meningkatnya aktivitas LNPRT, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, maupun bantuan kemanusiaan, yang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika sosial ekonomi daerah.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Total Konsumsi LNPRT					
- ADHB (Miliar Rp)	32,96	34,39	37,51	41,49	49,92
- ADHK 2010 (Miliar Rp)	24,6	25,09	26,15	27,48	32,16
- Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,15	1,15	1,13	1,15	1,30
Pertumbuhan (ADHK 2010)		2,08	4,26	5,08	3,35

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah:

- a. *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah
- b. *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga)
- c. *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku (ADHB) secara konsisten mengalami peningkatan sepanjang periode 2020–2024, meskipun sempat stagnan pada tahun 2022. Kenaikan dari Rp389,84 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp474,93 miliar pada tahun 2024 menunjukkan adanya tren ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan layanan publik dan realisasi program-program pembangunan, terutama setelah masa pandemi. Penurunan tipis pada tahun 2022 menjadi Rp405,47 miliar kemungkinan dipengaruhi oleh restrukturisasi anggaran atau pergeseran fokus belanja pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK) juga mengalami pola yang sejalan, meskipun terdapat fluktuasi kecil dari sisi volume riil belanja. Setelah tumbuh dari Rp255,24 miliar pada 2020 menjadi Rp261,60 miliar di 2021, terjadi sedikit penurunan pada 2022 menjadi Rp259,24 miliar yang mengindikasikan tekanan pada kemampuan belanja pemerintah secara riil, kemungkinan sebagai akibat dari ketatnya ruang fiskal atau efisiensi anggaran. Namun demikian, tren kembali meningkat pada 2023 dan 2024 menunjukkan adanya pemulihan dalam kapasitas belanja riil pemerintah, seiring membaiknya perekonomian dan peningkatan penerimaan daerah.

Proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan stabil di kisaran 12–14 persen. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 13,56 persen, kemungkinan mencerminkan intervensi fiskal yang lebih besar dalam merespons dampak awal pandemi. Penurunan proporsi pada tahun-tahun berikutnya—hingga titik terendah 12,09 persen pada 2023—dapat diartikan sebagai indikasi meningkatnya peran sektor lain dalam membentuk PDRB, atau menurunnya dominasi pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi. Meski demikian, kenaikan kembali menjadi 12,41 persen pada 2024 mengisyaratkan peningkatan partisipasi fiskal terhadap total aktivitas ekonomi daerah.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Total Konsumsi Pemerintah					
- ADHB (Miliar Rp)	389,84	405,69	405,47	434,59	474,93
- ADHK 2010 (Miliar Rp)	255,24	261,6	259,24	272,6	294,74
- Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	13,56	13,55	12,23	12,09	12,41
Pertumbuhan (ADHK 2010)		2,49	(0,90)	5,15	7,30

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara *riil* menunjukkan adanya fluktuasi, baik secara total maupun rata-rata per penduduk selama periode 2020–2024. Parameter ini dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur sejauh mana pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengakses manfaat dari pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan (ADHK 2010) selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Setelah mengalami pertumbuhan moderat sebesar 2,49 persen pada tahun 2021, konsumsi *riil* pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar -0,90 persen pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian atau pembatasan dalam realisasi belanja pemerintah, yang dapat berkaitan dengan efisiensi anggaran, pengalihan prioritas belanja, atau pengaruh eksternal lainnya yang berdampak pada daya serap anggaran.

Namun, tren negatif tersebut tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Tahun 2023 mencatatkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 5,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas pemerintah dalam hal pengeluaran mulai meningkat kembali, yang dapat mencerminkan pelaksanaan program-program strategis nasional

maupun daerah yang lebih optimal. Selain itu, pemulihan ekonomi secara umum dan pelonggaran pembatasan sosial juga turut mendukung peningkatan belanja pemerintah.

Pemulihan tersebut berlanjut pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah secara riil meningkat lebih tinggi menjadi 7,30 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, mencerminkan kinerja fiskal yang semakin kuat dan kemampuan pemerintah untuk mendorong belanja dalam rangka peningkatan layanan publik. Kenaikan signifikan ini juga bisa menjadi sinyal peningkatan efektivitas penyerapan anggaran serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang lebih merata.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (*fisik*). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (*kapital*)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
- ADHB (Miliar Rp)	1.104,33	1.201,79	1.278,39	1.362,00	1.414,34
- ADHK 2010 (Miliar Rp)	846,2	893,87	897,8	926,49	953,73
- Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	38,42	40,14	38,57	37,91	36,96
Pertumbuhan (ADHK 2010)		5,63	0,44	3,20	2,94

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun dieksport

Total nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2020–2024. Nilainya tercatat sebesar Rp1.104,33 miliar pada 2020, kemudian naik menjadi Rp1.201,79 miliar pada 2021, dan terus meningkat menjadi Rp1.278,39 miliar pada 2022, Rp1.362,00 miliar pada 2023, hingga mencapai Rp1.414,34 miliar pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan terus berlangsungnya aktivitas investasi fisik, termasuk di sektor infrastruktur, peralatan, dan bangunan lainnya di daerah.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK), PMTB juga mengalami pertumbuhan meskipun dalam besaran yang lebih fluktuatif. Pada 2020, nilai PMTB riil sebesar Rp846,20 miliar, meningkat menjadi Rp893,87 miliar pada 2021. Pertumbuhan tertahan pada 2022 dengan nilai sebesar Rp897,80 miliar, kemudian meningkat kembali menjadi Rp926,49 miliar pada 2023, dan mencapai Rp953,73 miliar pada 2024. Data ini mencerminkan bahwa secara riil, aktivitas pembentukan modal tetap terus berlangsung meski dalam laju yang bervariasi setiap tahunnya.

Dari sisi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, proporsi PMTB menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, kontribusi PMTB terhadap PDRB sebesar 38,42 persen dan mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 40,14 persen. Namun setelahnya, proporsi ini terus menurun menjadi 38,57 persen pada 2022, 37,91 persen pada 2023, dan mencapai titik terendah sebesar 36,96 persen pada 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pergeseran struktur PDRB ke arah komponen lain, seperti konsumsi rumah tangga yang semakin dominan.

Pertumbuhan PMTB berdasarkan harga konstan 2010 mencerminkan fluktuasi yang erat kaitannya dengan dinamika investasi dan pelaksanaan proyek pembangunan. Pada 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 5,63 persen yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh percepatan proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Buton Selatan. Namun, pada 2022 pertumbuhan turun tajam menjadi hanya 0,44 persen. Setelahnya, pertumbuhan kembali meningkat menjadi 3,20 persen pada 2023 dan sedikit melambat menjadi 2,94 persen pada 2024. Fluktuasi ini memperlihatkan bahwa PMTB sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, serta pemulihan pasca pandemi.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang tidak biasa. Pada awalnya, nilainya relatif kecil, yaitu sebesar Rp1,27 miliar pada 2020, naik menjadi Rp1,33 miliar pada 2021, dan Rp1,35 miliar pada 2022. Namun, terjadi lonjakan sangat besar pada tahun 2023 menjadi Rp96,57 miliar, sebelum akhirnya menurun drastis ke Rp22,02 miliar pada 2024. Lonjakan pada 2023 dapat mencerminkan akumulasi stok barang dalam skala besar, yang kemungkinan besar terkait dengan proyek pembangunan atau lonjakan pasokan logistik tertentu.

Jika dilihat dari sisi riil atau atas dasar harga konstan 2010 (ADHK), perubahan inventori juga mengalami fluktuasi yang mencolok. Pada 2020, nilainya tercatat sebesar Rp0,96 miliar dan hanya sedikit naik menjadi Rp0,98 miliar pada 2021, lalu menjadi Rp1,00 miliar pada 2022. Tahun 2023 menunjukkan lonjakan tajam hingga Rp70,10

miliar, mengindikasikan peningkatan nyata dalam stok barang atau persediaan fisik. Namun pada 2024, nilainya kembali menurun drastis menjadi Rp15,48 miliar. Pola ini menunjukkan bahwa peran inventori dalam perekonomian daerah sangat bergantung pada kebutuhan sementara, seperti pengadaan bahan untuk proyek pembangunan atau ketidakseimbangan pasokan-permintaan.

Kontribusi perubahan inventori terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan variasi besar selama lima tahun terakhir. Dari 2020 hingga 2022, proporsinya tetap stabil sebesar 0,04 persen, menandakan kontribusi yang relatif kecil dan konstan. Namun pada tahun 2023, proporsi ini melonjak drastis menjadi 2,69 persen, sebelum kembali menurun menjadi 0,58 persen pada 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa pada 2023, perubahan inventori memberikan kontribusi yang tidak lazim terhadap struktur PDRB, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi non-rutin seperti penumpukan logistik untuk proyek besar atau lonjakan pengadaan barang publik.

Pertumbuhan perubahan inventori berdasarkan harga konstan juga mengalami dinamika yang sangat fluktuatif. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan sebesar 2,08 persen, sedikit melambat menjadi 2,04 persen pada 2022. Pertumbuhan meningkat signifikan menjadi 6,91 persen pada 2023, mencerminkan peningkatan besar dalam volume inventori yang tersedia di daerah. Namun, pada 2024 pertumbuhan mengalami kontraksi tajam sebesar -77,91 persen. Penurunan ini menunjukkan pelepasan besar-besaran terhadap stok barang atau pengurangan aktivitas penyimpanan, yang dapat terjadi karena efisiensi anggaran, selesainya proyek strategis, atau pergeseran struktur permintaan.

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Buton Selatan 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Total Perubahan Inventori					
- ADHB (Miliar Rp)	1,27	1,33	1,35	96,57	22,02

- ADHK 2010 (Miliar Rp)	0,96	0,98	1	70,1	15,48
- Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,04	0,04	0,04	2,69	0,58
Pertumbuhan (ADHK 2010)		2,08	2,04	6,91	(77,91)

3.2.6. Net Ekspor

Sumber data untuk penghitungan ekspor impor barang dan jasa antar daerah belum tersedia yang sesuai dengan konsep dan definisi. Sumber data yang selama tersedia hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan penghitungan ekspor impor antar provinsi menjadikan komponen ini dalam PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yaitu perbedaan antara total PDRB menurut lapangan usaha dengan total PDRB menurut pengeluaran. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik suatu wilayah. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Komponen net ekspor secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor barang jasa antar daerah dan impor barang jasa antar daerah. Sama seperti perubahan inventori, net ekspor menghasilkan angka positif dan negatif. Apabila nilai net ekspor positif, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor. Sebaliknya, apabila nilai net ekspor negative, maka nilai impor antar daerah lebih besar dari eksportnya.

Nilai nominal net ekspor barang dan jasa Kabupaten Buton Selatan selama periode 2020–2024 selalu menunjukkan angka negatif, yang mencerminkan defisit neraca perdagangan daerah. Pada tahun 2020, nilai net ekspor tercatat sebesar -Rp345,42 miliar dan terus meningkat defisitnya menjadi -Rp380,87 miliar pada 2021. Tahun 2022 mencatatkan penurunan defisit menjadi -Rp290,86 miliar, namun kembali meningkat tajam menjadi -Rp414,01 miliar pada 2023, sebelum sedikit membaik menjadi -Rp385,83 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai impor secara

konsisten melampaui ekspor, yang bisa mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap barang dari luar daerah atau kurangnya daya saing produk ekspor lokal.

Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian	2020 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Total Net Ekspor						
- ADHB (Miliar Rp)	(345,42)	(380,87)	(290,86)	(414,01)	(385,83)	
- ADHK 2010 (Miliar Rp)	(228,90)	(248,31)	(209,15)	(320,68)	(287,95)	
- Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB	(12,02)	(12,72)	(8,78)	(8,76)	(10,07)	
Pertumbuhan (ADHK 2010)		8,57	(15,68)	(9,47)	(18,26)	

Jika dilihat atas dasar harga konstan 2010 (ADHK), nilai net ekspor juga menunjukkan pola serupa dengan angka negatif setiap tahunnya. Pada 2020, nilai net ekspor tercatat sebesar -Rp228,90 miliar dan meningkat menjadi -Rp248,31 miliar pada 2021. Tahun 2022 mengalami perbaikan menjadi -Rp209,15 miliar, namun kembali menurun drastis menjadi -Rp320,68 miliar pada 2023. Tahun 2024 memperlihatkan sedikit perbaikan dengan nilai defisit sebesar -Rp287,95 miliar. Angka-angka ini menegaskan bahwa secara riil, kontribusi perdagangan luar daerah masih membebani perekonomian lokal.

Proporsi net ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga selalu negatif selama lima tahun terakhir, dengan kontribusi rata-rata sekitar -10 persen. Tahun 2020 mencatatkan proporsi sebesar -12,02 persen terhadap PDRB, dan meningkat menjadi -12,72 persen pada 2021. Selanjutnya, terjadi penurunan defisit relatif menjadi -8,78 persen pada 2022 dan -8,76 persen pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi -10,07 persen pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya efisiensi atau peningkatan produksi lokal, ketergantungan terhadap barang dari luar masih cukup tinggi.

Dari sisi pertumbuhan riil (ADHK), net ekspor mengalami variasi signifikan selama periode 2020–2024. Tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,57 persen, yang menandakan adanya sedikit perbaikan dalam neraca perdagangan.

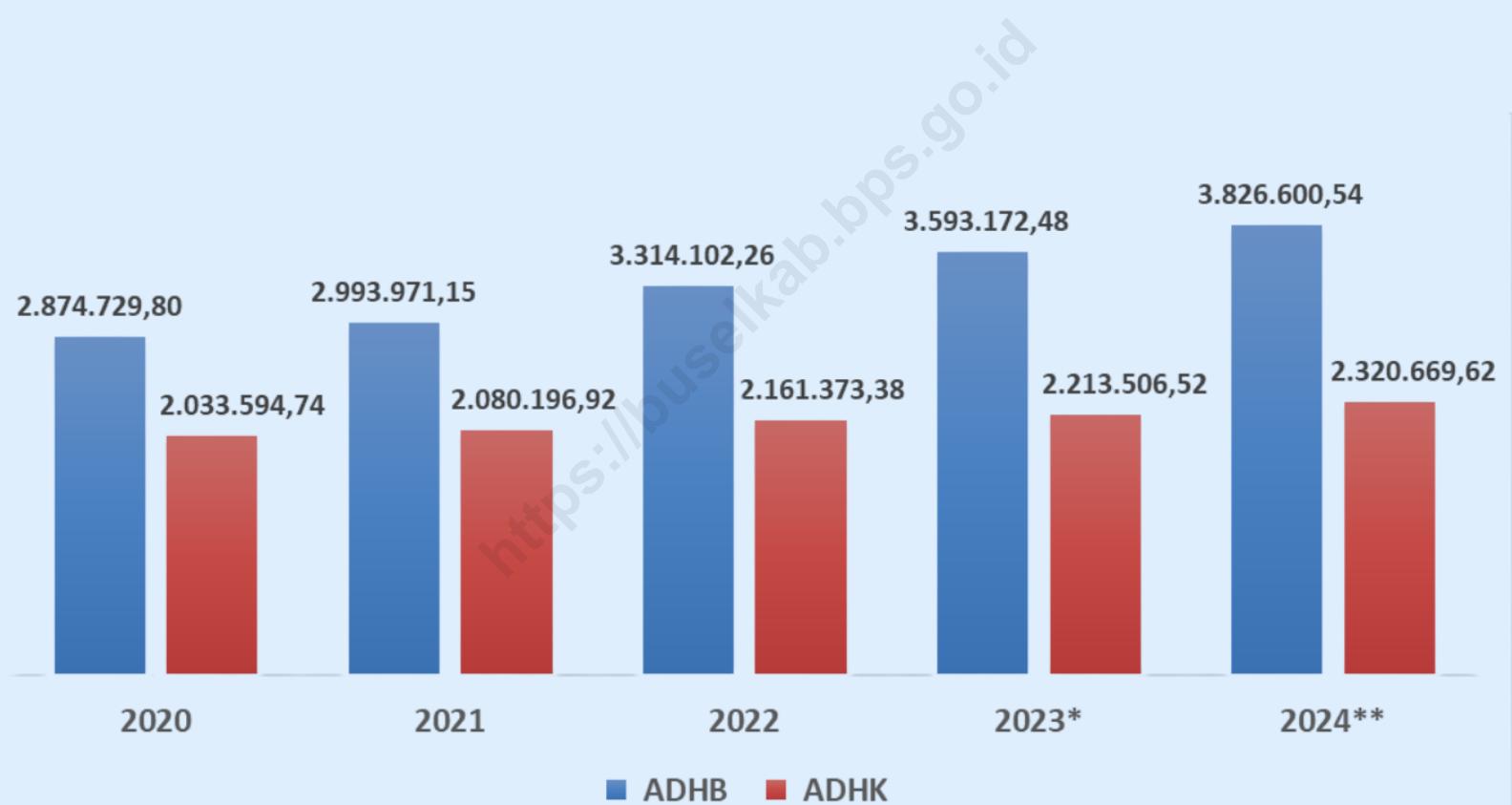
Namun, tahun-tahun berikutnya mengalami kontraksi berturut-turut: -15,68 persen pada 2022, -9,47 persen pada 2023, dan -18,26 persen pada 2024. Penurunan tajam ini menunjukkan memburuknya kinerja ekspor atau meningkatnya tekanan dari sisi impor, yang bisa jadi berkaitan dengan meningkatnya konsumsi barang dari luar atau belum optimalnya pengembangan sektor-sektor unggulan daerah untuk bersaing di pasar luar.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN



NILAI PDRB PER KAPITA KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020-2024 (JUTA RUPIAH)



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menggambarkan nilai total produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah ekonomi Kabupaten Buton Selatan selama periode tertentu. Di dalamnya masih terkandung komponen depresiasi (penyusutan), sehingga mencerminkan nilai bruto dari produksi domestik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kerap digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat produktivitas suatu daerah karena mencerminkan kapasitas wilayah dalam menghasilkan output ekonomi. Perhitungan PDRB dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi (nilai tambah bruto), pendekatan pengeluaran (penggunaan akhir), dan pendekatan pendapatan.

Melalui series data PDRB menurut pendekatan pengeluaran, dapat diturunkan sejumlah indikator turunan yang relevan untuk analisis ekonomi lebih lanjut. Beberapa ukuran tersebut dapat dikaitkan dengan variabel sosial ekonomi lain, seperti jumlah rumah tangga dan tenaga kerja. Salah satu indikator penting yang kerap digunakan untuk mengukur perkembangan kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan adalah PDRB per kapita, yaitu rasio antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Selain itu, indikator seperti konsumsi per kapita, investasi per tenaga kerja, maupun rasio antar komponen pengeluaran dapat memberi gambaran mengenai efisiensi dan arah pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	2.874,73	2.993,97	3.314,10	3.593,17	3.826,60
PDRB per kapita (Juta Rp)					
- ADHB	30,15	31,09	33,83	35,35	37,20
- ADHK 2010	21,34	21,60	22,06	21,78	22,56
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010					
	-	1,23	2,13	(1,27)	3,58
Jumlah Penduduk (000 orang)	95,318	96,319	97,945	101,600	102,881
Pertumbuhan	-	1,05	1,69	3,73	1,26

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir mencerminkan penggunaan barang dan jasa akhir, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi tanpa melalui proses produksi lebih lanjut. Dalam sistem perekonomian, pelaku konsumsi akhir terdiri atas rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan pemerintah. Meskipun ketiga institusi tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam struktur ekonomi, seluruhnya tetap

membelanjakan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Pola dan besaran konsumsi akhir ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat serta arah kebijakan fiskal pemerintah di suatu wilayah.

Tabel 13. Total Pengeluaran Konsumsi Akhir dan Proporsi terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rupiah)					
- Rumah Tangga	1.691,75	1.731,65	1.882,25	2.072,51	2.251,23
- LNPRT	32,96	34,39	37,51	41,49	49,92
- Pemerintah	389,84	405,69	405,47	434,59	474,93
Jumlah	2.114,55	2.171,73	2.325,23	2.548,59	2.775,08
PDRB (ADHB) (Miliar Rupiah)	2.874,73	2.993,97	3.314,10	3.593,17	3.826,60
Proporsi	73,56	72,54	70,16	70,92	71,52

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"**ICOR**" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 15. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Buton Selatan, 2020-2024

Uraian	2020 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2023* (4)	2024** (5)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rupiah)	2.033,59	2.080,20	2.161,37	2.213,51	2.320,67
Perubahan (Miliar Rupiah)	-	46,61	81,17	52,14	107,16
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rupiah)	846,20	893,87	897,80	926,49	953,73
ICOR	-	19,18	11,06	17,77	8,90

- PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2020 hingga 2024 menggambarkan perubahan struktur serta perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Buton Selatan pada periode tersebut.** Analisis ekonomi dari sisi pengeluaran berbeda dengan pendekatan berdasarkan lapangan usaha (industri), yang lebih menyoroti perilaku produksi. Sementara itu, analisis berdasarkan pengeluaran fokus pada penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk konsumsi, investasi fisik, maupun perdagangan antarwilayah. Terdapat empat kelompok utama pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir, yaitu rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPT), pemerintah, dan dunia usaha.
- Publikasi ini menyajikan analisis sederhana terkait perilaku konsumsi, investasi, serta perdagangan antarwilayah dan luar negeri.** Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator yang diturunkan dari data PDRB pengeluaran, serta dilengkapi dengan data sosial-demografi seperti jumlah penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri, guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.
- Data disajikan dalam bentuk runtutan (time series) dari tahun 2020 hingga 2024,** sehingga memudahkan dalam melihat perubahan dan kecenderungan yang terjadi dari waktu ke waktu. Masing-masing parameter ditampilkan dalam satuan

yang sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis, seperti rupiah, indeks, persen, rasio, atau unit.

4. **Indikator yang diturunkan dari data PDRB menurut pengeluaran dapat menjadi acuan untuk mengembangkan indikator ekonomi makro lainnya**, seperti pendapatan disposabel, tabungan, atau model-model ekonomi sederhana yang menghubungkan berbagai variabel ekonomi yang tersedia. Data ini juga dapat dikaitkan dengan statistik makro lainnya, seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), hingga Neraca Arus Dana (NAD).
5. **Sebagian data mengenai interaksi ekonomi dengan luar daerah (external account), seperti ekspor dan impor, turut disajikan dalam publikasi ini.** Informasi ini mencerminkan tingkat keterkaitan dan ketergantungan ekonomi Kabupaten Buton Selatan terhadap aktivitas ekonomi di luar wilayahnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

<https://buselkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 1.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.691,75	1.731,65	1.882,25	2.072,51	2.251,23
2. Konsumsi LNPRT	32,96	34,39	37,51	41,49	49,92
3. Konsumsi Pemerintah	389,84	405,69	405,47	434,59	474,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.104,33	1.201,79	1.278,39	1.362,00	1.414,34
5. Perubahan Inventori	1,27	1,33	1,35	96,57	22,02
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(345,42)	(380,87)	(290,86)	(414,01)	(385,83)
PDRB	2.874,73	2.993,97	3.314,10	3.593,17	3.826,60

Lampiran 2.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure Item</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.135,49	1.146,96	1.186,34	1.237,52	1.312,51
2. Konsumsi LNPRT	24,60	25,09	26,15	27,48	32,16
3. Konsumsi Pemerintah	255,24	261,60	259,24	272,60	294,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	846,20	893,87	897,80	926,49	953,73
5. Perubahan Inventori	0,96	0,98	1,00	70,10	15,48
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(228,90)	(248,31)	(209,15)	(320,68)	(287,95)
PDRB	2.033,59	2.080,20	2.161,37	2.213,51	2.320,67

Lampiran 3.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58,85	57,84	56,81	57,68	58,83
2. Konsumsi LNPRT	1,15	1,15	1,13	1,15	1,30
3. Konsumsi Pemerintah	13,56	13,55	12,23	12,10	12,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,42	40,14	38,57	37,91	36,96
5. Perubahan Inventori	0,04	0,04	0,04	2,69	0,58
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(12,02)	(12,72)	(8,78)	(11,52)	(10,08)
PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Persen)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure Item</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-0,10	1,01	3,48	4,27	6,06
2. Konsumsi LNPRT	-6,82	1,99	4,23	5,08	17,03
3. Konsumsi Pemerintah	-3,19	2,49	-0,90	5,15	8,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,04	5,63	0,37	3,26	2,94
5. Perubahan Inventori	0,80	2,13	1,21	6.932,69	-77,91
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	0	0,68	4,44	-8,2	5,54
PDRB	-1,39	2,29	3,90	2,41	4,84

Lampiran 5.

Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure Item</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	148,99	150,98	158,62	167,47	171,52
2. Konsumsi LNPRT	133,99	137,06	143,44	151,01	155,24
3. Konsumsi Pemerintah	152,73	155,08	156,41	159,43	161,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	130,50	134,45	142,47	147,01	148,30
5. Perubahan Inventori	131,36	135,10	135,28	137,76	142,22
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,00)	(2,45)	1,25	2,34	1,19
PDRB	141,36	143,93	153,33	162,33	164,89

Lampiran 6.

Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (Persen)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure Item</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,30	1,33	5,06	5,58	2,42
2. Konsumsi LNPRT	1,02	2,29	4,65	5,28	2,80
3. Konsumsi Pemerintah	2,17	1,54	0,85	1,93	1,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,92	3,02	5,97	3,18	0,88
5. Perubahan Inventori	6,20	2,84	0,13	1,84	3,23
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2,22)	0,58	2,72	0,78	(0,83)
PDRB	0,36	1,81	6,54	5,87	1,58

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

<https://buselkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts an Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock by Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

Halaman ini sengaja dikosongkan